

Dampak Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Leme-Leme Bungin Kab. Banggai Kepulauan

Muh. Rifaldi Latarang^{1*}, Abdul Jalil², Fatimawali³, Sriwaningsih S Nahe⁴, Farhan A. Bidullah⁵, Mutmainah⁶

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

rifaldilpaldi818@gmail.com^{1*}, sriwaningsihснаhe@gmail.com², farhanagub@gmail.com³,
mmutmainah053@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: rifaldilpaldi818@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role and contribution of the Village Government of Leme-Leme Bungin in enhancing the economic empowerment of the fishing community. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that assistance programs, such as the provision of boats and engines, have had a positive impact on improving the productivity and economic welfare of fishermen. However, the implementation of these programs still faces several challenges, including equipment mismatch, extreme weather, limited technical training, and restricted market access. Additionally, the suboptimal performance of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) also affects the effectiveness of empowerment efforts. Strong collaboration between the village government, the community, and supporting institutions is required to achieve sustainable and inclusive empowerment.*

Keywords: *Community Empowerment, Fishermen, Village Government, Coastal Economy, Village-Owned Enterprises (BUMDes)*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi Pemerintah Desa Leme-Leme Bungin dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan berupa perahu dan mesin memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi nelayan. Namun, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian alat, cuaca ekstrem, minimnya pelatihan, dan keterbatasan akses pasar. Selain itu, peran BUMDes yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas pemberdayaan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pendukung agar pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan, Pemerintah Desa, Ekonomi Pesisir, BUMDes

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pesisir. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan kekayaan laut yang melimpah, nelayan memiliki peran penting sebagai penyedia kebutuhan pangan dan penggerak ekonomi lokal maupun nasional (Windasai, 2021).

Namun, di tengah potensi besar tersebut, nelayan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan alat produksi, akses pasar yang terbatas, dan rendahnya inovasi teknologi dalam pengelolaan hasil tangkapan (Hermawan, 2025). Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Desa Leme-Leme Bungin, Kabupaten Banggai Kepulauan,

Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun memiliki kekayaan laut dan posisi geografis yang strategis, masyarakat nelayan di desa ini belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Permasalahan seperti minimnya penggunaan teknologi modern, dominasi tengkulak dalam distribusi hasil tangkapan, dan kurangnya infrastruktur pendukung menyebabkan ketergantungan pada hasil tangkapan harian tetap tinggi dan penghasilan mereka tidak stabil.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal memegang peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi lokal. Namun demikian, pelaksanaan program seringkali mengalami kendala seperti keterbatasan dana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman terhadap pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan (Windasai, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat pesisir. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti efektivitas peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi nelayan, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Desa Leme-Leme Bungin, masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini, yakni mengisi celah dalam literatur mengenai dinamika lokal dalam pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kelembagaan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Leme-Leme Bungin. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi kebijakan dan program yang diterapkan, mengevaluasi hambatan implementasinya, serta menilai dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi nelayan secara menyeluruh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok dalam mengelola potensi yang dimiliki, mengambil keputusan penting, serta bertindak demi perbaikan kualitas kehidupan mereka (Suryono, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa diartikan

sebagai rangkaian tindakan untuk mendorong kemandirian serta peningkatan taraf hidup warga desa, melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kesadaran kolektif, disertai dukungan kebijakan, kegiatan pembangunan, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan aktual. Widjaja menekankan bahwa esensi pemberdayaan terletak pada penggalan seluruh potensi lokal demi tercapainya tujuan bersama. Hal ini diwujudkan dengan memotivasi warga, mendorong munculnya ide-ide baru, serta meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian desa secara berkelanjutan (Enda, 2020).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Tujuannya adalah mendorong partisipasi aktif dan kontrol masyarakat atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat dikatakan berdaya ketika mampu mengenali permasalahan, mencari solusi, serta menyelesaikannya secara mandiri dan kolektif demi tercapainya kesejahteraan dan ketangguhan bersama (Amanda, 2023).

Peran Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa diartikan sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan juga pemerintah kelurahan. Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menetapkan serta menjalankan kebijakan pemerintah di wilayah setempat (Nelly, 2024). Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola urusan administrasi dan sosial yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Peran strategis ini menjadikan pemerintah desa sebagai kunci dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga (Herry, 2015). Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diterapkan prinsip-prinsip yang lebih komprehensif untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penghormatan terhadap keberagaman, dorongan partisipasi aktif masyarakat, otonomi, serta pemberdayaan masyarakat (Migharyoso, 2018).

Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan adalah kelompok sosial yang bermukim di sekitar wilayah pesisir dan menggantungkan sumber kehidupan mereka secara langsung kepada laut. Ketergantungan ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap berbagai tantangan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan tidak bisa dipandang secara sederhana karena sifatnya yang kompleks dan saling

berkaitan wilayah pesisir sering kali diasosiasikan dengan kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap ikan atau nelayan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa sebagian besar penduduk di kawasan tersebut mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian utama (Dano, 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan mereka adalah pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, bukan solusi yang bersifat sementara atau sepihak (Sufi, 2019).

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup serta meningkatkan harkat kelompok sosial yang selama ini berada dalam posisi marjinal, seperti mereka yang mengalami kemiskinan atau keterisolasian secara sosial (Diningrat, 1999). Fokus utama pemberdayaan adalah membekali masyarakat dengan kemampuan dan kepercayaan diri agar mandiri dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih dari sekadar akses sumber daya, pemberdayaan mencakup pendampingan dalam mengenali potensi lokal, merancang pembangunan berbasis kebutuhan, serta membangun sistem pengambilan keputusan yang inklusif menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan partisipatif (Windasai, 2021). Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga sosial ekonomi di lingkungannya. Keberhasilan pemberdayaan ini membutuhkan partisipasi aktif, khususnya dari pemerintah daerah, dalam menyediakan pelatihan, pendidikan, dan infrastruktur pendukung. Sinergi antara nelayan, pemerintah, dan masyarakat luas menjadi kunci terciptanya kemandirian, inovasi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Windasai, 2021).

Tantangan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

- Tingkat pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya laut yang masih minim.

Kurangnya pengetahuan pengelolaan sumber daya menghambat proses pemberdayaan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut secara optimal. Kondisi ini terlihat di Desa Pastabulu, di mana penurunan pendapatan hasil laut setiap tahun mencerminkan rendahnya keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara efektif (Buamona, 2024). Hal ini menjadi indikasi bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan perlu lebih ditingkatkan untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya laut mereka.

Rendahnya pengetahuan nelayan tentang pengelolaan hasil tangkapan berdampak pada produktivitas yang rendah dan masih dominannya metode tradisional dalam

pengolahan. Hal ini menyebabkan proses distribusi lambat, pendapatan tidak stabil, dan penurunan kontribusi ekonomi kepada pemerintah desa. Dalam beberapa kasus, nelayan bahkan tidak mampu memenuhi kewajiban penyetoran sebagai bagian dari program pemberdayaan yang telah disepakati.

- Pengadaan sarana dan prasana tidak mengalami perkembangan.

Strategi yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Setiap strategi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di lapangan (Sulemang, 2024). Pemerintah desa perlu mengembangkan ide-ide inovatif dalam pemberdayaan sektor perikanan agar strategi yang diterapkan tidak stagnan dan mampu menjawab persoalan penurunan hasil tangkapan dan penjualan. Salah satu aspek penting adalah penyediaan alat tangkap yang tepat dan sesuai kebutuhan, karena ketidaksesuaian alat dapat menghambat efektivitas program pemberdayaan nelayan.

- BUM Desa tidak melaksanakan Tugas & Fungsinya dengan Baik.

BUM Desa berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi lokal. Di Desa Pastabulu, BUM Desa diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dengan melibatkan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan warga dan menciptakan sumber pendapatan desa yang berkelanjutan (Sucipto, 2016). Nilai kerja sama dan saling membantu dalam Islam menjadi semangat utama dari program pemberdayaan. Rasulullah SAW bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Terjemahan:

“Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi motivasi moral bahwa setiap pihak yang terlibat dalam menolong masyarakat, termasuk melalui bantuan alat tangkap, pelatihan, dan pendampingan usaha, akan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang bersifat naratif, berdasarkan pengalaman dan persepsi para informan. Data disajikan secara deskriptif dan kronologis, dengan fokus pada penjelasan fenomena yang terjadi di lapangan (Rusli, 2021).

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersifat orisinal dan belum diolah sebelumnya (Hermanto,2020). Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang diperoleh dari dokumen atau sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti laporan resmi, buku, jurnal ilmiah, atau situs web. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap referensi yang relevan dengan topik penelitian (Muspawi,2024). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Leme-leme Bungin, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yang memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap. Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai nelayan, dan sektor kelautan menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi oleh Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Leme-Leme Bungin sejak tahun 2023 telah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi masyarakat nelayan melalui bantuan sarana perikanan, khususnya perahu dan mesin (Jahing,2025). program ini dirancang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat sektor ekonomi berbasis sumber daya kelautan.

Program ini telah berhasil menyalurkan sebanyak 40 unit perahu dan mesin kepada masyarakat nelayan. Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pendataan dan ketersediaan anggaran Dana Desa.

Hal ini bisa dilihat pada informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak Rais Akbar:

Sampai saat ini, jumlah bantuan perahu dan mesin yang telah disalurkan kepada masyarakat nelayan mencapai sebanyak 40 unit. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Akbar,2025).

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan, pemerintah desa menerapkan pemantauan dan evaluasi selama enam bulan pertama. Jika bantuan tidak digunakan secara aktif, maka akan dialihkan kepada nelayan lain yang lebih membutuhkan, guna menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat.

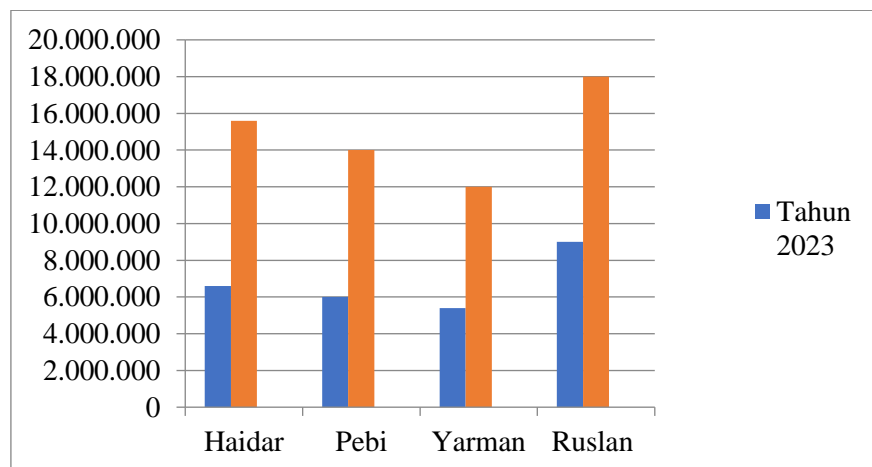
Evaluasi terhadap bantuan dilakukan melalui pemantauan selama enam bulan. Apabila perahu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka akan dialihkan kepada nelayan lain yang lebih layak dan belum memperoleh bantuan (Akbar,2025).

Dampak Program Pemerintah Desa terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan

Program bantuan perahu dan mesin di Desa Leme-Leme Bungin memberikan dampak positif bagi nelayan, khususnya dalam meningkatkan sarana melaut, pendapatan, kemandirian, dan taraf hidup keluarga secara keseluruhan. Bantuan Sesuai Kebutuhan dan Tepat Sasaran. Sebagian besar nelayan menyatakan bahwa bantuan perahu dan mesin dari pemerintah desa telah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Bantuan tersebut membantu mengatasi keterbatasan alat tangkap dan meningkatkan jangkauan serta hasil tangkapan harian.

Bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan sebagai nelayan. Bantuan ini benar-benar menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi, seperti keterbatasan alat tangkap dan bantuan ini juga membawa dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan kita (Hidar,2025).

Bantuan perahu dan mesin dinilai sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan, terutama dalam mengatasi keterbatasan alat tangkap. Ketersediaan alat yang memadai terbukti meningkatkan produktivitas dan hasil tangkapan. Dampaknya, pendapatan nelayan turut meningkat dan berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Berikut disajikan tabel peningkatan penghasilan masyarakat nelayan tahun 2023–2024:



Gambar 1. Peningkatan Pendapatan Di Tahun 2023-2024

Sumber: Hasil Wawancara (2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah desa tepat sasaran dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

- **Peningkatan Produktivitas dan Hasil Tangkapan**

Dengan bantuan perahu dan mesin yang lebih layak, nelayan mampu melaut lebih jauh dan lebih lama, sehingga hasil tangkapan meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa nelayan menyebutkan bahwa tangkapan mereka hampir dua kali lipat lebih banyak dibanding sebelum menerima bantuan.

Sejak dapat bantuan perahu ini, alhamdulillah hasil tangkapan saya jadi lebih banyak, hampir dua kali lipat dari biasanya. Soalnya perahunya lebih cepat dan besar, jadi saya bisa pergi di tempat yang dulu tidak bisa saya jangkau (Djahadeng, 2024)

- **Perbaikan Kesejahteraan dan Ekonomi Keluarga**

Peningkatan hasil tangkapan setelah menerima bantuan perahu berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga nelayan. Pendapatan harian yang lebih tinggi memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa harus berutang. Hal ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam stabilitas ekonomi rumah tangga nelayan salah satu nelayan menyampaikan:

Alhamdulillah, saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus berutang seperti dulu. Dan yang paling membahagiakan adalah saya sudah bisa menyekolahkan anak saya dengan lebih layak. (Haidar Nelayan, 2024).

Bantuan yang diberikan tidak hanya meningkatkan produktivitas nelayan, tetapi juga membuka peluang bagi perbaikan kualitas hidup, termasuk pendidikan anak. Hal ini menunjukkan kontribusi program terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan secara menyeluruh.

Kendala dan Permasalahan dalam Implementasi Program

- **Kendala dari Pihak Pemerintah Desa**

Meskipun program bantuan perahu dan mesin telah memberikan dampak positif, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis dan pengawasan. Salah satu kebijakan pemerintah desa adalah melakukan pemantauan selama enam bulan pascapenyerahan, namun implementasinya terkendala kesiapan teknis penerima.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Turing, salah satu penerima bantuan:

Perahu itu memang saya tidak pakai karena waktu diberikan belum ada mesinnya. Saya disuruh pakai mesin lama dulu, tapi mesin saya kecil, tidak kuat dorong perahu besar itu (Turing, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlambatan kelengkapan alat dan ketidaksesuaian mesin dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan bantuan. Oleh karena itu, perencanaan dan koordinasi yang matang sebelum penyaluran bantuan sangat diperlukan agar setiap komponen yang disalurkan benar-benar dapat digunakan sesuai fungsinya dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.

- **Kendala dari Pihak Penerima Bantuan (Nelayan)**

Meskipun bantuan yang diberikan sangat membantu, para nelayan tetap menghadapi beberapa kendala nyata dalam operasional di lapangan. Di antaranya:

- **Faktor Cuaca dan Alam:**

Cuaca buruk seperti hujan deras, angin kencang, dan gelombang tinggi tetap menjadi kendala utama bagi nelayan, meskipun telah memiliki perahu dan mesin yang layak, seperti yang disampaikan oleh salah satu nelayan:

Cuaca buruk seperti angin kencang dan gelombang tinggi masih menjadi kendala bagi kami nelayan. Kadang harus menunda melaut demi keselamatan (Yarman, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor cuaca tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga mengganggu ritme kerja dan pendapatan.

- **Minimnya Pelatihan dan Pendampingan Teknis**

Nelayan menyampaikan bahwa tidak ada pelatihan teknis lanjutan pasca-penyaluran bantuan, baik terkait penggunaan, perawatan, maupun pengelolaan hasil tangkapan Sebagaimana disampaikan oleh salah satu nelayan:

Memang tidak ada pelatihan secara khusus. Kami hanya diberi arahan singkat saat penyerahan perahu, terutama soal tanggung jawab dan larangan menjual perahu bantuan yang akan dipergunakan untuk hal-hal ilegal seperti pengeboman ikan (Ruslan, 2025)

Kurangnya pendampingan ini menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan bantuan. Tanpa pelatihan, risiko kesalahan penggunaan atau pemeliharaan dapat mengurangi dampak positif dari program.

Harapan dari Masyarakat Nelayan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nelayan tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga memiliki aspirasi terhadap keberlanjutan program. Salah satu harapan mereka adalah bantuan alat tangkap modern, sebagaimana disampaikan:

Kami berharap ada bantuan alat tangkap juga ke depannya, bukan hanya perahu (Ruslan,2025)

Selain itu, nelayan juga menyoroti perlunya dukungan akses pemasaran agar harga jual tetap stabil saat hasil tangkapan melimpah:

Kadang hasil tangkapan banyak, tapi harganya jatuh. Kalau bisa dibantu akses pasar, kami bisa lebih sejahtera (Pian,2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya integrasi program bantuan dengan penguatan hulu-hilir perikanan agar dampaknya lebih maksimal.

Harapan lainnya adalah terkait keberadaan Kartu Nelayan. Kartu ini dianggap penting sebagai identitas dan syarat administratif dalam berbagai program bantuan maupun layanan pemerintah di sektor perikanan. Seorang nelayan menyatakan:

Kami berharap ada Kartu Nelayan, agar lebih mudah menerima bantuan dan menjadi prioritas dalam program-program pemerintah dalam sektor perikanan (Yusuf, 2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Leme-Leme Bungin telah menunjukkan peran aktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan melalui berbagai program seperti bantuan alat tangkap, pelatihan keterampilan, serta pembangunan sarana pendukung. Upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sebagian nelayan. Namun demikian, efektivitas dari program-program tersebut masih belum optimal karena terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana desa, serta kurang maksimalnya peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.

Di sisi lain, masyarakat nelayan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan secara maksimal. Beberapa hambatan utama meliputi rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, ketergantungan pada alat tangkap tradisional, serta terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Selain itu, lemahnya dukungan kelembagaan dan minimnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut juga memperlambat proses pemberdayaan. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pendukung sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, maka penulis menyarankan:

Bagi Pemerintah Desa Leme-Leme Bungin: Pemerintah desa diharapkan dapat melanjutkan dan memperluas program pemberdayaan yang telah ada dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Bantuan alat tangkap seperti perahu dan mesin sebaiknya disertai dengan pelatihan teknis bagi nelayan mengenai cara pemanfaatan dan perawatan alat secara efektif. Selain itu, penting juga untuk memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) atau koperasi nelayan agar kegiatan ekonomi mereka dapat dikelola secara kolektif dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga diharapkan menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta lembaga non-pemerintah, guna menghadirkan pendampingan usaha dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil tangkapan nelayan.

Bagi Masyarakat Nelayan: Para nelayan hendaknya lebih aktif dalam memanfaatkan bantuan dan program pemberdayaan yang telah disediakan pemerintah desa. Kesadaran kolektif dan kemauan untuk berinovasi sangat diperlukan agar usaha perikanan tidak stagnan. Nelayan juga perlu meningkatkan literasi usaha dan teknologi, misalnya dengan mengikuti pelatihan pengolahan hasil laut, manajemen keuangan sederhana, serta pemasaran berbasis digital. Dengan demikian, nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan mentah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dari potensi kelautan yang mereka miliki.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari sisi ruang lingkup dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan kuantitatif agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan terukur. Selain itu, penting pula mengkaji efektivitas program pemberdayaan dalam jangka panjang serta dampaknya terhadap indikator kesejahteraan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup masyarakat nelayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan jurnal ini. Terima kasih khusus ditujukan kepada dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berarti sejak awal hingga akhir penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada pemerintah Desa Leme-Leme Bungin, khususnya Kepala Desa dan aparat desa, serta masyarakat nelayan yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk

berbagi informasi, pengalaman, serta pandangan berharga terkait program pemberdayaan ekonomi di desa Leme-Leme Bungin.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu atas semangat kolaborasi dan saran konstruktif selama proses penulisan jurnal ini. Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga dan sahabat atas dukungan moril, motivasi, dan doa yang selalu mengiringi. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi masyarakat pesisir, dan menjadi referensi yang berguna dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amanda, Mariska Dwi, Et Al., *Kontribusi Masyarakat Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia Di Era Digital*, Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol 2, No 6, (2023): 45-63.
- Antono Herry P.A, “*Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)*,” Jurnal Ilmiah Civis, Vol 5, No 1, (2015): 737.
- Buamona, Sulemang, Et Al, “*Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula*,” Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa Vol 7, No.2 (2024): 30.
- Dano, Citra Putri, “*Pola Komunikasi Masyarakat Nelayan Di Era Teknologi Informasi: (Studi Deskriptif Di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo)*,” MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 5, No.1, (2022): 300.
- Haidar, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-Leme Bungin, Tanggal 28 Maret 2024.
- Haidar, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-Leme Bungin, Tanggal 28 Maret 2024.
- Hendrawan Sucipto, “*Hadits: Allah Senantiasa Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Itu Menolong Saudaranya*” (Yayasan Pendidikan Shafiiyyatul Amaliyyah, 10 Agustus 2016), <https://ypsa.id/2016/08/10/hadits-allah-senantiasa-menolong-seorang-hamba-selama-hamba-itu-menolong-saudaranya/>, diakses 25 April 2025.
- Hermawan, Adi Puspita, et al. "Tantangan dan Peluang Usaha pada Koperasi Sektor Perikanan: Studi Lapangan KUD Minasari Pangandaran." *Koaliansi: Cooperative Journal* 4.2 (2025): 83-92.
- Jasanuding Jahing, Kepala Desa, “Wawancara”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 27 Maret 2025.
- Joni Hermanto, *Pengaruh Isu, Figur, Rekam jejak dan partai politik terhadap partisipasi si pemilih dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019*, Jurnal universitas tribhhuwana tunggadewi, Vol 10 No. 1, (2020).

- Kiki Endah “*Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*” Jurnal Moderat, Vol 6, No.1, (2020): 137
- Mingharyoso, Mohammad Sudwi. "kedudukan, peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) pasca reformasi (ditinjau dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa)." (2018).
- Nelly, Samsiah, Et Al, “*Kinerja Pemerintahan Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,*” Jurnal Sociopolitico, Vol 6, No 2, (2024): 179-184.
- Pian, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-leme Bungin, 28 Maret 2025.
- Rais Akbar, Sekertaris Desa, “*Wawancara*”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 27 Maret 2025.
- Rismanto Djahadeng, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-Leme Bungin, Tanggal 28 Maret 2024
- Rusandi dan muhammad Rusli, *Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus*, (2021).
- Ruslan, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-leme Bungin, 28 Maret 2025.
- Ruslan, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-leme Bungin, 28 Maret 2025.
- Sumodiningrat, Gunawan., *Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Journal Of Indonesian Economy And Business (JIEB), Vol 14, No 3, (1999): 14.
- Suryadi, Ayu Mentari, And Sufi Sufi, “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara),*” Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol 2, No.2 (2019): 130.
- Suryono B, *Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, (2020).
- Turing, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-leme Bungin, 28 Maret 2025.
- Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, *Memahami sumber data penelitian : Primer, Sekunder, dan tersier*, Jurnal Edu Research, Vol 5, No 3, (2024).
- Windasai, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep),*” Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 2, No.3, (2021): 793.
- Yarman, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-leme Bungin, 28 Maret 2025.
- Yusuf, Nelayan, “Wawancara”, Desa Leme-leme Bungin, 28 Maret 2025